

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan media utama yang berisi informasi mengenai aktivitas transaksi keuangan suatu entitas serta mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu.¹ Bagi perusahaan terbuka, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyajian laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan kepada publik merupakan kewajiban yang telah diatur dalam regulasi pasar modal.² Kewajiban ini membuat pihak manajemen berupaya keras menampilkan kondisi keuangan yang stabil dan menguntungkan agar mampu menarik kepercayaan investor, menjaga hubungan baik dengan kreditur, serta mempertahankan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Laporan keuangan sendiri berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau justru sedang menghadapi tekanan keuangan. Informasi yang tersaji di dalamnya menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pemilik perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, laporan keuangan memiliki peran vital dalam menunjang keberlangsungan operasional perusahaan.³

¹ Cindy Nila Sabrina dan David Effendi, “Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Analisis Elemen-Elemen Fraud Hexagon,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13, no. 9 (2024): 1–19, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6114>.

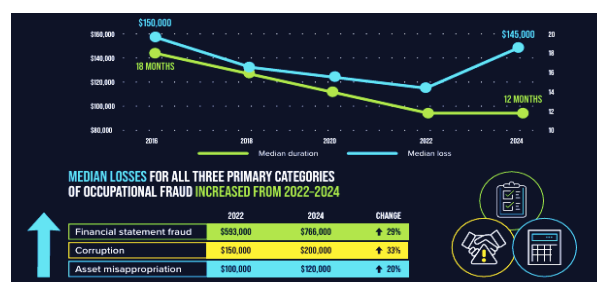
² Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengumuman Terkait Kewajiban Penyampaian Lk Auditan Tahunan 2023: 1-4. Diakses pada link <http://www.idx.co.id> (Mei 2024).

³ Sabrina dan Effendi, “Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Analisis Elemen-Elemen

Pentingnya peran laporan keuangan seringkali menimbulkan dilema. Di satu sisi, manajemen dituntut menyajikan informasi yang transparan dan sesuai standar akuntansi. Akan tetapi, di sisi lain terdapat tekanan untuk menampilkan kinerja perusahaan yang seolah-olah lebih baik dari kondisi sebenarnya. Tekanan inilah yang dapat mendorong munculnya praktik-praktik tidak etis, seperti manipulasi laporan, rekayasa laba, korupsi, hingga bentuk kecurangan lainnya yang bertujuan mempercantik citra perusahaan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam *Report to the Nations 2024*, kecurangan di tempat kerja merupakan penyalahgunaan jabatan seseorang untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan organisasi. ACFE menjelaskan bahwa kecurangan ini dapat terjadi di berbagai jenis perusahaan, baik swasta maupun publik, dan dilakukan oleh siapa pun, mulai dari pegawai hingga pimpinan. Laporan tersebut mengelompokkan *fraud* menjadi tiga jenis, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan.⁴

Gambar 1.1 Tren *Fraud* 2022-2024



Sumber: A Report to the Nations 2024

Berdasarkan *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations* yang

Fraud Hexagon.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13, no. 9 (2024): 1–19, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6114>.

⁴ ACFE, “*Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations*,” *Association of Certified Fraud Examiners*, 2024, 1–106.

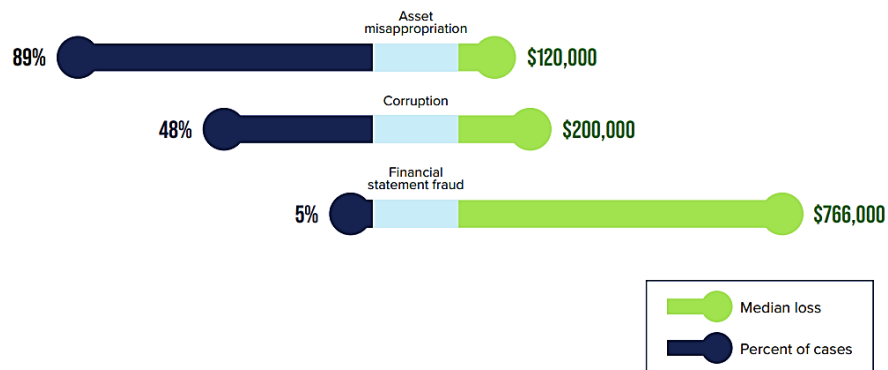
diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), sepanjang periode 2020–2024 tingkat keparahan *fraud* menunjukkan tren peningkatan.⁵ Data tersebut memperlihatkan bahwa median kerugian *fraud* secara keseluruhan kembali meningkat pada tahun 2024 meskipun durasi median terjadinya *fraud* mengalami penurunan hingga sekitar 12 bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *fraud* dapat terdeteksi lebih cepat, namun nilai kerugian yang ditimbulkan justru semakin besar, mencerminkan semakin kompleksnya modus kecurangan yang dilakukan.

Selain itu, laporan ACFE menunjukkan bahwa seluruh kategori utama *fraud* mengalami peningkatan median kerugian pada periode 2022–2024. Financial statement *fraud* mengalami peningkatan median kerugian dari sekitar USD 593.000 menjadi USD 766.000 atau naik sebesar 29 persen, menjadikannya jenis *fraud* dengan dampak finansial terbesar. Selain itu, *fraud* berbasis korupsi juga meningkat sebesar 33 persen, sementara penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) meningkat sebesar 20 persen. Temuan ini menegaskan bahwa risiko *fraud*, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan, masih menjadi ancaman serius bagi organisasi.

Peningkatan median kerugian *fraud* yang terjadi pada periode 2022–2024 tidak terlepas dari besarnya dampak financial statement *fraud* dan korupsi, yang meskipun jarang terjadi, menimbulkan kerugian finansial paling besar dibandingkan jenis *fraud* lainnya.

⁵ ACFE. “Association Of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 : A Report To The Nations.” Association of certified fraud examiners. 2024. 1-106.

Gambar 1.2 Fraud di Dunia



Sumber: A Report to The Nation 2024

Berdasarkan data dari gambar di atas yang merujuk pada survei oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam laporan *Report to the Nations* tahun 2024, terdapat tiga kategori utama kecurangan yang paling sering terjadi. Pertama, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan jenis kecurangan yang paling umum, terjadi pada 89% kasus dengan rata-rata kerugian sebesar USD 120.000 per kasus. Kedua, korupsi (*corruption*) ditemukan pada 48% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar USD 200.000. Ketiga, meskipun hanya mencakup 5% dari keseluruhan kasus, kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) menimbulkan kerugian yang paling besar, yaitu rata-rata sebesar USD 766.000 per kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasusnya relatif kecil, kecurangan laporan keuangan memberikan dampak finansial yang sangat signifikan terhadap organisasi.⁶

Temuan global mengenai kegagalan tata kelola perusahaan sejalan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada sektor Badan

⁶ ACFE, "Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations." "*Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations*," Association of Certified Fraud Examiners, 2024, 1–106.

Usaha Milik Negara (BUMN). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lingkungan BUMN belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mencegah praktik kecurangan. Salah satu kasus yang sangat fenomenal adalah manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018, di mana perusahaan secara tidak sah mencatatkan laba bersih sebesar USD 809 ribu yang bersumber dari pengakuan pendapatan prematur atas kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi.⁷

Praktik tersebut merupakan bentuk manajemen laba yang melanggar prinsip akuntansi akrual dalam PSAK, mengingat pembayaran belum diterima dan tidak memiliki kepastian metode pelunasannya. Investigasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Keuangan mengungkap adanya pelanggaran serius terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh auditor internal maupun eksternal yang bersangkutan. Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan, integritas, dan kompetensi profesional dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, yang pada akhirnya memberikan citra kondisi keuangan yang lebih baik dari realita sebenarnya kepada para pemangku kepentingan.

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2024 adalah skandal yang melibatkan PT Timah Tbk (TINS), yang menimbulkan potensi kerugian negara dengan estimasi mencapai Rp300 triliun. Rincian kerugian tersebut mencakup kerugian akibat kerja sama yang tidak transparan sebesar Rp2,285

⁷ Kelvina Yenanda dan Vinvin Evelyn, "Analisis Pelanggaran Kode Etika Akuntansi Publik Pada PT Garuda Indonesia TBK," *Jurnal Ilmu Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 189–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>.

triliun, kerugian terkait transaksi pembayaran bijih timah sebesar Rp26,649 triliun, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup mencapai Rp27,1 triliun. Modus operasi yang digunakan dalam praktik tersebut terungkap melalui keberadaan perusahaan-perusahaan bayangan yang secara ilegal menampung dan mengelola bijih timah. Praktik ilegal ini diduga sengaja dikamufase dengan dalih kerja sama penyewaan peralatan peleburan timah.⁸

Kasus kecurangan laporan keuangan juga terjadi pada PT Indofarma Tbk yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi. Berdasarkan temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikaji oleh Fahmi dkk. (2026), terdapat berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM). Penyimpangan tersebut meliputi transaksi fiktif pada akun piutang, utang, dan uang muka pembelian alat kesehatan yang diduga dilakukan untuk memperbaiki tampilan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, ditemukan pula transaksi jual beli fiktif melalui unit bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp157,33 miliar.⁹

Tidak hanya itu, audit juga menemukan adanya penagihan kepada pihak ketiga yang tidak disetorkan kepada perusahaan induk dengan nilai mencapai

⁸ Cindy Nila Sabrina dan David Effendi, “Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Analisis Elemen-Elemen Fraud Hexagon,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13, no. 9 (2024): 1–19, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6114>.

⁹ Much. Nur Kholish Fahmi et al., “Analisis Fraud Triangle Dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Pada PT Indofarma Tbk,” *Jurnal Bisnis* 06, no. 02 (2026): 13–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/grjb.v6i02.2754>.

Rp470 miliar, serta penggunaan pendanaan melalui platform pinjaman online tanpa persetujuan yang semestinya. Berbagai penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa risiko kecurangan laporan keuangan masih dapat terjadi pada perusahaan BUMN dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif melalui mekanisme Good Corporate Governance untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.¹⁰

Selain faktor internal perusahaan, kondisi makroekonomi juga dapat memberikan tekanan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Efendi, Yuliani, dan Natalina pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk menunjukkan bahwa selama krisis kesehatan tahun 2020 terjadi penurunan kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan fluktuasi nilai tukar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan.¹¹ Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakstabilan lingkungan bisnis dapat memengaruhi kondisi perusahaan serta meningkatkan tuntutan bagi manajemen untuk mempertahankan kinerja yang baik di hadapan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam situasi seperti ini, penerapan mekanisme pengawasan yang efektif melalui *Good Corporate Governance* menjadi semakin penting untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

¹⁰ Fahmi et al. Fahmi et al.

¹¹ Yliani Efendi, Rofik dan Sri Anugrah Natalina, "The Impact Of The 2020 Health Crisis On Exchange Rates And Stock Prices In Indonesia (Study on PT. Jasa Marga Persero)," *Journal of Islamic Accounting and Finance* III, no. 2 (2020): 113–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i2.734>.

Banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan atau salah saji material dalam laporan keuangan yang terjadi di beberapa perusahaan terutama di Indonesia, hal tersebut menandakan bahwa lemahnya sistem *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan.¹² *Corporate governance* (CG), atau tata kelola perusahaan, adalah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan pemantauan manajemen, sekaligus memastikan akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan kerangka peraturan. Konsep ini dirancang untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.¹³

Perusahaan publik di Indonesia diwajibkan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pada 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sejak tahun 2015, Otoritas

¹² Fiadinda Danty Jauhari dan Susi Dwi Mulyani, "Kualitas Audit Dan Manajemen Risiko Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," Oktober 4, no. 2 (2024): 739–48, <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.20939>.

¹³ Bursa Efek Indonesia. (n.d.), "Tata Kelola Perusahaan". (2025): diakses pada link <https://www.idx.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/>.

Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 terkait penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka untuk meningkatkan transparansi dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan masjid.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, D., & Reskino, mengatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dapat membantu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dipicu oleh faktor rasionalisasi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andreas, dkk mengatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang secara efektif belum dapat mengurangi potensi kecurangan laporan keuangan.¹⁵ Yessi.D.S dan Abubakar.A. juga mengatakan *Good Corporate Governance* yang baik dapat mencegah terjadinya tindakan *financial statement fraud*.¹⁶

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menguji peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi, terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya karena adanya inkonsistensi hasil. Penelitian yang

¹⁴ Aurya Dewitri, Angel Siboro, dan Ratih Kusumastuti, “Dampak Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Laporan Keuangan Masjid (Analisis Studi Kasus Dikota Jambi),” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no.1 (2024) :1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.489>.

¹⁵ Andreas Tanjaya dan Febrian Kwarto, “Tata Kelola Perusahaan Dalam Mengurangi Kecurangan Laporan Keuangan (Systematic Literature Review Dengan Metode Meta Sintesis),” *Jurnal Akademi Akuntansi* 5, no. 3 (2022): 312–32, <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248>.

¹⁶ Yessi Doapril Sinaga dan Abubakar Arief, “Pengaruh *Fraud* Diamond Dan Good Corporate Governance Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (16 Agustus 2023): 2633–42, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17565>.

dilakukan oleh Fitriyani & Noviyanti menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dari perspektif komite audit berpengaruh dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan.¹⁷ Tetapi, penelitian Maisaroh & Nurhidayati justru menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan GCG dalam mencegah kecurangan laporan keuangan masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena ini juga terlihat pada perusahaan BUMN di Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset publik dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, BUMN seharusnya menjadi contoh dalam penerapan GCG yang efektif dan transparan. Pemerintah pun telah menegaskan kewajiban penerapan GCG melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang menekankan prinsip-prinsip utama seperti akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kemandirian, dan kewajiban.

Dalam praktiknya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya optimal. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 serta dugaan penyimpangan pada PT Timah Tbk tahun 2024 menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian internal pada beberapa BUMN masih lemah. Fenomena ini

¹⁷ F., & Noviyanti, E. Fitriyani, "Pengaruh Komite Audit Terhadap Pencegahan *Fraud* .," *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Indonesia*, , 2021, 66–75.

¹⁸ L., & Wulandari, D. Nurhayati, "Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. ," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, , 2020, 50–60.

memperlihatkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan BUMN masih perlu diperkuat agar mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kondisi tersebut membuat penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana penerapan GCG dapat memengaruhi potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tiga komponen utama GCG, yaitu dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional, karena ketiganya dianggap memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan, baik secara internal maupun eksternal.¹⁹ Dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawasi, memberikan arahan kepada direksi, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan perusahaan.²⁰ Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam meninjau keandalan laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.²¹ Sementara itu, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif karena investor institusional memiliki kepentingan jangka panjang untuk menjaga

¹⁹ Hera Khairunnisa Fadisa Talitha Sahda, Marsellisa Nindito, "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 6, no. 2 (Agustus 2025). Hal 256.

²⁰ Zirda Kurnia et al., "Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide (Cashflow) The Influence Of Corporate Governance On Financial Report Fraud With Company Size As A Moderating Variable In Infrastructure, Utilities, And Transportation Companies Listed On T" 3, no. 2 (2024): 276–90, <https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/>.

²¹ Amir Indrabudiman Adistra Rifaldi, "Pengaruh *Fraud Pentagon* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (November 2022): 11.

integritas laporan keuangan dan menekan perilaku oportunistik manajemen.²²

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Dewan Komisaris Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
2. Bagaimana penerapan Komite Audit Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
3. Bagaimana penerapan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
4. Bagaimana kecurangan laporan keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kecurangan laporan keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek

²² Tri Handayani dan Martinus Budiantara, “Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap integritas laporan keuangan,” *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5, no. 3 (2023): 287–98, <https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i3.1126>.

Indonesia Periode 2020-2024?

7. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
8. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan Dewan Komisaris Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024
2. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan Komite Audit Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024
3. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024
4. Untuk Mengetahui bagaimana Kecurangan laporan keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap

kecurangan laporan keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kecurangan laporan keuangan Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori manajemen dan akuntansi, terutama yang berkaitan dengan *Corporate Governance* dan pengendalian kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kecurangan laporan keuangan yang dapat mengurangi pengaruh tersebut. Dengan mempelajari hubungan antara *Corporate Governance* yang baik dan kecurangan laporan keuangan, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderating, penelitian ini akan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan dan pengawasan *Corporate*

Governance. Fokus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI juga akan menyumbangkan bukti empiris yang memperkaya teori ekonomi dan keuangan, khususnya terkait penerapan *Corporate Governance* di pasar berkembang, serta membuka kemungkinan untuk memperluas penerapan teori ini pada sektor-sektor lainnya.

2. Kegunaan Secara Praktisi

a) Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai pentingnya penerapan *Corporate Governance* yang efektif untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Dengan memahami temuan penelitian, perusahaan dapat memperbaiki struktur manajemen, pengawasan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko kecurangan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menguranginya.

b) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan ajar pada mata kuliah akuntansi keuangan, audit, dan *corporate governance*, serta sebagai media diskusi akademik tentang transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi studi selanjutnya, baik dalam menguji faktor lain yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan

maupun memperluas penelitian pada sektor dan periode yang berbeda.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, khususnya pada perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu investor ritel dalam menilai perusahaan BUMN dengan tata kelola yang baik sehingga lebih bijak dalam mengantisipasi risiko investasi serta terhindar dari perusahaan yang berpotensi melakukan kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman tentang peran *corporate governance* dalam mengurangi risiko kecurangan di sektor BUMN. Dengan demikian, meningkatnya pemahaman terhadap mekanisme pengawasan dan tata kelola yang efektif diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan berintegritas serta menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran *corporate governance* dalam mengurangi risiko kecurangan di sektor BUMN.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang membahas *corporate governance* dan

kecurangan, sekaligus menambah wawasan literatur akuntansi keuangan mengenai fungsi *corporate governance* dalam mencegah kecurangan laporan keuangan.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zirda Kurnia Dkk dengan judul “The Influence Of *Corporate Governance* On Financial Report Fraud With Company Size As A Moderating Variable In Infrastructure, Utilities, And Transportation Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange During The Period 2019-2021”

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dewan komisaris maupun komite audit berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, kepemilikan institusional tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya, ukuran perusahaan melemahkan hubungan antara kepemilikan institusional dan kecurangan laporan keuangan.²³

Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini berkaitan dengan *Corporate Governance* sebagai variabel independen, kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian sebelumnya pada perusahaan utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021,

²³ Zirda Kurnia dkk., “Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide (Cashflow) The Influence Of Corporate Governance On Financial Report Fraud With Company Size As A Moderating Variable In Infrastructure, Utilities, And Transportation Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange During The Period 2019-2021” 3 (2024), <https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/>.

sedangkan penelitian ini pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Candra Dkk dengan judul “Tata Kelola Perusahaan Dan Kecurangan Pelaporan Keuangan Studi Kasus Industri Barang Konsumsi di BEI”

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan dewan remunerasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Namun, variabel independensi dewan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Demikian pula, variabel-variabel lain seperti keahlian keuangan CEO, keahlian keuangan dewan, cakupan upaya dewan, dan kepemilikan manajerial juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini berkaitan dengan *Corporate Governance* sebagai variabel independen dan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian dan variabel moderating. Dimana objek dalam penelitian sebelumnya pada industri barang konsumen di BEI Periode 2018-2022, sedangkan penelitian ini pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Emrinaldi Nur DP, Mudrika Alamsyah Hasan Dwi Kasih Shaumi Putri dengan judul “Pengaruh *Good*

²⁴ Rudi Candra dkk., “Tata Kelola Perusahaan Dan Kecurangan Pelaporan Keuangan: Studi Kasus Industri Barang Konsumen Di Bei,” *Jurnal Keuangan dan Bisnis ISSN*, vol. 22, Maret 2024.

Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Periode 2017-2019)”.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,017 < 0,05$, komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$, ukuran perusahaan mampu memoderasi dampak kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, ukuran perusahaan mampu memoderasi dampak komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$, dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi dampak komite audit terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,093 > 0,05$.

Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini berkaitan dengan *Corporate Governance* sebagai variabel independen, kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen, ukuran perusahaan sebagai variabel moderating dan perusahaan BUMN sebagai objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada periode yang diteliti dimana penelitian sebelumnya dari tahun 2017-2019 kurun

waktu 3 tahun, sedangkan penelitian ini dari tahun 2020-2024 kurun waktu 5 tahun.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Yulistia Muslim Agnes Monica dengan judul “Pengaruh Corporate Govenance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa varial karakteristik dewan komisaris dan karakteristik dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini berkaitan dengan *Corporate Governance* sebagai variabel independen dan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan tahun penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya pada perusahaan *consumer cyclical*s yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, sedangkan penelitian ini pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.²⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Lailatur Rohmatin, Gaguk Apriyanto, dan Diana Zuhroh dengan judul “The Role of Good *Corporate governance* to Fraud Prevention : An Analysis Based on *the Fraud Pentagon*”

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi dan kesempatan

²⁵ Emrinaldi Nur DP, Mudrika Alamsyah Hasan Dwi Kasih Shaumi Putri, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019),” JOM FEB, vol. 8, Desember 2021.

²⁶ Resti Yulistia Muslim Agnes Monica, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan,” 2023. Hal 1-3.

berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan, namun rasionalisasi, tekanan, dan arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa *corporate governance* yang baik dapat meminimalkan pengaruh kesempatan dan rasionalisasi terhadap kecurangan, namun *corporate governance* perusahaan yang baik memperkuat dampak kompetensi terhadap kecurangan. Sementara itu, tekanan dan arogansi tidak dimoderasi oleh tata kelola perusahaan yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini berkaitan dengan *Corporate Governance* kecurang sebagai variabel dependen. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian, dimana variabel independen dalam penelitian sebelumnya ada lima. Yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi, *corporate governance* sebagai variabel moderating, dan perusahaan perbankan tahun 2016-2019 sebagai objek. Sedangkan penelitian ini *corporate governance* sebagai variabel independen, ukuran perusahaan sebagai variabel moderating, dan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2020-2024 sebagai objek dan tahun penelitian.²⁷

²⁷ Binti Lailatur Rohmatin, Gaguk Apriyanto, dan Diana Zuhroh, "The Role of Good Corporate Governance to Fraud Prevention: An analysis based on the *Fraud Pentagon*," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 25, no. 2 (16 Mei 2021), <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5554>.